



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR **94** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Renja Badan Daerah;
 - f. Renja Dinas Daerah; dan
 - g. Renja Kecamatan.
- (2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perdagangan;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Dinas Pariwisata.
- (4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

**M. DINAS PERTANAHAN DAN
TATA RUANG**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

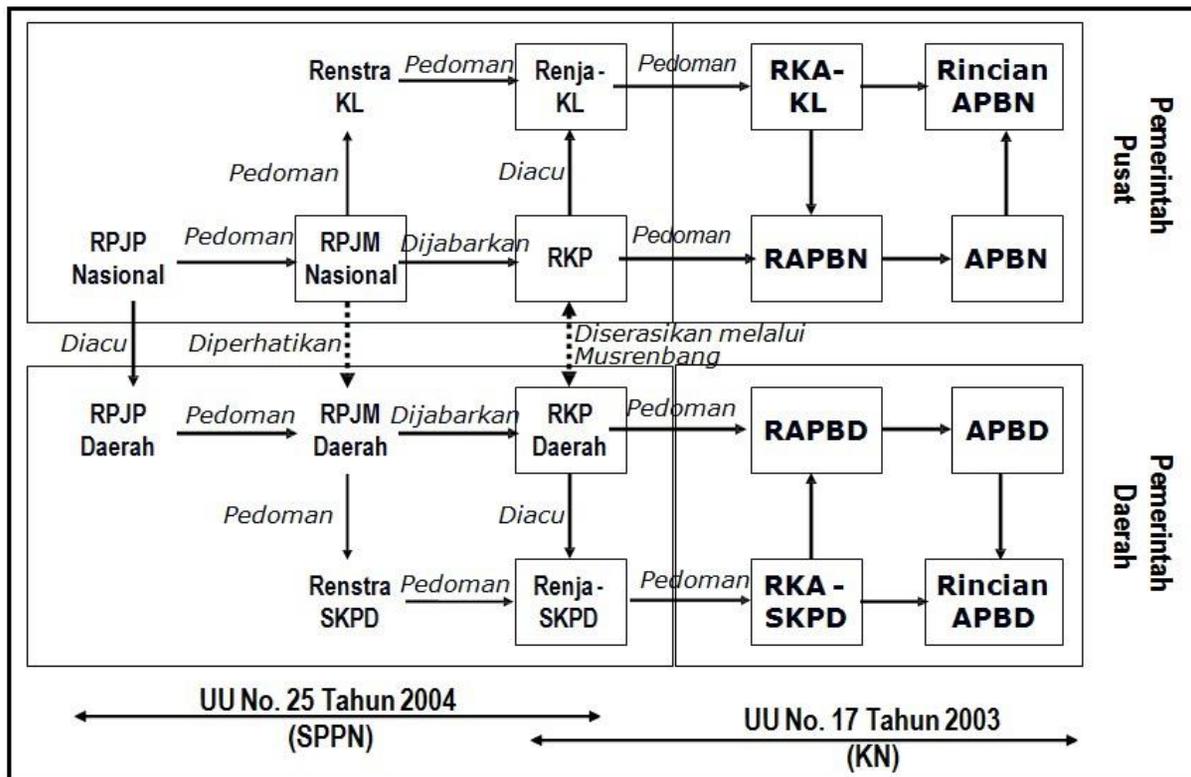
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pertanahan								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	Nilai	81	81,05	100,06	82	82	100
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis	20	20	100	44	44	100
	Jumlah alat listrik dan elektronika	Jenis	11	11	100	11	11	100
	Jumlah materai	Lembar	1.600	1.550	96,87	820	820	100
	Jenis peralatan kebersihan	Jenis	14	14	100	14	14	100
	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	15	15	100	10	10	100
	Jumlah pembelian bendera	buah	2	2	100	-	-	-
	Jumlah pembayaran telepon	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran air	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran listrik	Kali	12	11	91,67	12	12	100
	Jumlah pembayaran surat kabar	Kali	12	12	100	12	12	100
	Jumlah pembayaran internet	Kali	12	12	100	12	12	100
Terlaksananya Publikasi	Unit	11	11	100	10	10	100	
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas dalam daerah	OH	947	1252	132,21	513	513	100
	Perjalanan Dinas luar daerah	OH	195	116	59,49	65	65	100
	Jumlah Jamuan Rapat	orang	1.200	1.661	138,42	220	220	100
	Jumlah Jamuan Tamu	orang	250	250	100	34 lap	34 lap	100
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Honor Tenaga kontrak	bulan	140	140	100	144	144	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persentase	100	98,75	98,75	100	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penggantian Jaringan Listrik	Unit	3	3	100	-	-	-
	Pemeliharaan Halaman dan Tanaman	Unit	1	1	100	-	-	-
	Terpeliharanya Gedung	Unit	5	5	100	2	2	100
	Tempat parkir	unit	1	1	100	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan Surat-Surat Kendaraan Dinas	Unit	17	17	100	19	19	100
	Jumlah BBM	liter	9.000	11.421	126,9	5.962	5.962	100
	Jumlah penggantian suku cadang dan service	unit	17	17	100	19	19	100
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	5	100	5	5	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Almari	Unit	1	1	100	-	-	-
	Rak Buku	Unit	4	4	100	-	-	-
	Kulkas	Unit	1	1	100	-	-	-
	Air Conditioner	Unit	3	3	100	-	-	-
	Komputer (untuk Peta)	Unit	3	3	100	-	-	-
	Komputer	Unit	5	5	100	-	-	-
	Laptop	Unit	2	2	100	1	1	100
	IPAD	Unit	-	-	-	-	-	-
	Printer	Unit	3	3	100	2	2	100
	Printer (A3)	Unit	1	1	100	-	-	-
	Monitor LED	Unit	-	-	-	-	-	-
	Server	Unit	-	-	-	-	-	-
	GPS	Unit	3	3	100	-	-	-
Kamera	Unit	1	1	100	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Drone	Unit	1	1	100	-	-	-
	Software	Unit	1	0	0	-	-	-
	Meja Rapat	Unit	-	-	-	-	-	-
	Kursi Rapat	Unit	-	-	-	-	-	-
	LCD Proyektor	Unit	2	2	100	-	-	-
	Sound System	Unit	1	1	100	-	-	-
	Meja kerja	Unit	28	28	100	-	-	-
	Kursi kerja	Unit	28	28	100	-	-	-
	UPS	Unit	3	3	100	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi kinerja	nilai	83	89,38	107,68	85	85	100
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Jumlah honor pengelola keuangan	OB	156	143	91,67	168	168	100
	Jumlah jasa konsultansi	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Pemutakhiran Data	Jumlah arsip digital	Data	8	8	100	-	-	-
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	persentase	92	99,37	108,01	96	96	100
Inventarisasi tanah kas desa	Jumlah database terupdate	Desa	75	75	100	15.644 bidang	15.644 bidang	100
	Jumlah pesera sosialisasi	Orang	80	80	100	-	-	-
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Jumlah pendaftaran berkas dan pembayaran ke kantor pertanahan	Bidang	64	64	100	5	5	100
	Sosialisasi	Orang	200	200	100	-	-	-
Pemanfaatan Tanah SG	Permohonan surat kekancingan / Rekomendasi Bupati	Dokumen	17	17	100	20	20	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Angka	15	15	100	15	15	100
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	Buah	10	15	150	15	15	100
	Jumlah Peserta sosialisasi konflik pertanahan	Orang	70	70	100	-	-	-
	Jumlah Peserta FGD konflik pertanahan	Orang	30	30	100	-	-	-
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	3	2	66,67	4	4	100
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Bahan Raperda tentang RTRW	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Peserta FGD RTRW	orang	75	75	100	-	-	-
	Konsinyering pembahasan substansi RTRW	Dokumen	1	1	100	-	-	-
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Bahan Raperda tentang RDTR	Dokumen	2	1	50	2	2	100
	FGD RDTR Pansela	orang	50	50	100	-	-	-
	Validasi KLHS RDTR Kasihan dan Sewon	dokumen	2	2	100	-	-	-
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Desa	4	4	100	-	-	-
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang kawasan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL tersusun	Dokumen	3	3	100	-	-	-
Studi tentang Tata Ruang	Dokumen Studi tentang Tata Ruang	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang	Persentase	75	71,93	95,91	77	77	100
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Konsolidasi tanah	Bidang	100	90	90	200	200	100
	Pengendalian dan monitoring	Kecamatan	6	6	100	-	-	-
	Audit pemanfaatan tanah tahun 2018	Kecamatan	17	2	11,76	3	3	100
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Survei dan penentuan lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	Peta Desa	3	3	100	11	11	100
	Publikasi	Siaran	8	8	100	4	4	100
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	Dokumen	2	2	100	1	1	100
	pendataan asset penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan di 6 Kecamatan	Dokumen	1	1	100	-	-	-
	penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jl. Jendral Sudirman	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kesulitan penentuan jadwal pelaksanaan koordinasi dan konsultasi khususnya untuk kegiatan ke luar daerah, dikarenakan fleksibilitas perubahan jadwal konsultasi dari bidang teknis terkait dengan kunjungan/koordinasi ke kementerian ATR dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sulit dipastikan.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terkendala pencapaian target pada kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan yang tidak tercapai 100%
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengadaan Software Aplikasi Persuratan tidak terlaksana akibat adanya Regulasi SPBE yang merupakan kebijakan satu pintu di Diskominfo
3	Program Perencanaan Tata Ruang	Target yang ditetapkan merupakan target akumulatif dari tahun sebelumnya mengingat proses yang panjang dan waktu yang dibutuhkan untuk satu perda tata ruang tidak dapat selesai dalam masa satu tahun. Dari 3 dokumen tata ruang yang sudah diperdakan sebagai target, realisasi 2 dokumen meliputi RDTR Kasihan dan RDTR Sewon.
	Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dari target 2 dokumen bahan Raperda RDTR, yang tercapai hanya Raperda RDTR Pansela, hal ini disebabkan proses pembahasan RDTR yang melibatkan lintas instansi (DPRD, DIY, BIG dan Kementerian ATR) membutuhkan proses dan koordinasi yang panjang
4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kinerja pengendalian pemanfaatan ruang melalui pemberian izin pemanfaatan ruang yang dimohonkan ternyata belum dilakukan tindak lanjut (pembangunan) sehingga mengurangi besarnya prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Output sub kegiatan konsolidasi tanah terkendala 10 bidang sertifikasinya karena pembatasan kuota di BPN

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Kegiatan Pemutakhiran data	Penyediaan rutin kesekretariatan dan pemeliharaan peralatan serta gedung kantor direncanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan pelaksanaan mengutamakan koordinasi dan komunikasi setiap personil dinas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan
2	Program Penatausahaan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Inventarisasi tanah kas desa Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY Kegiatan Pemanfaatan tanah SG	Program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran dan <i>outcome</i> sesuai target karena komitmen dan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah
3	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran rekomendasi penyelesaian penyelesaian konflik pertanahan sesuai target karena kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan seperti pihak pemerintah desa dan pemohon yang bersengketa Kebutuhan mendesak tentang aturan tata ruang di Kabupaten Bantul berupa reuiu RTRW dan RDTR mendorong komitmen bersama untuk melaksanakan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang terlaksana sesuai target sebanyak 4 desa karena perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang realistis
	Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Ketiga kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan	
	Kegiatan Studi tentang tata ruang	
	Kegiatan Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kebutuhan data pemetaan tanah desa dan tanah SG serta publikasi informasi ketataruangan kepada masyarakat menjadi pendorong komitmen perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan
	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dengan pihak ketiga penyedia jasa konsultan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang sesuai target kinerja yang telah ditetapkan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti pihak BPN, pemerintah desa, Kementerian ATR dalam pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan pihak desa dan masyarakat umum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Cakupan sertifikasi tanah (%)	-	84	93,16	92	99,37	96	100	
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan (dokumen)	-	2	2	3	2	4	4	
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	-	71	72	75	71,93	77	80	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan
- b. Persentase cakupan pengendalian tata ruang

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk perda yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dan permasalahan dalam pencapaian sasaran karena prosesnya harus mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian ATR/BPN yang memerlukan waktu dan proses lama.
- b. Tidak tercapainya persentase cakupan pengendalian tata ruang karena izin pemanfaatan ruang yang dimohonkan ternyata belum dilakukan tindak lanjut (pembangunan) sehingga mengurangi besarnya prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian tata ruang dalam pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang belum maksimal, selain itu sarana prasarana IT (aplikasi informasi kemasyarakatan) masih terbatas.

2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah cakupan sertifikasi tanah.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena dukungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta stakeholder yang terkait sangat mendukung program Persertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul. Selain itu adanya kebersamaan dan soliditas antara Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pamong Desa dan Tokoh Masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait Program PTSL.

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dan sinergitas serta penguatan sumber daya manusia khususnya berkenaan dengan Juknis Nomor 4/Juknis-HK.02.01/X/2019 tentang Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara pihak BPN, pihak desa, DPTR yang menunjang percepatan pensertifikatan tanah kasultanan di DIY
2. Pemanfaatan sistem teknologi untuk pengukuran tanah dalam rangka pemberkasan pertanahan di masa mendatang
3. Koordinasi yang lebih pro aktif dengan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN.
4. Pendataan dan digitalisasi pemanfaatan ruang, peningkatan sosialisasi dan publikasi tentang pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya sanksi tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR	Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang
	Lambatnya pengadministrasian pertanahan
	Proses penyusunan peraturan yang tidak sederhana memperlambat proses Perda RDTR dan RTRW

Selain itu, selama Tahun 2019, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
Adanya aturan (perda) yang mengatur pelaksanaan penataan ruang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang	Pengembangan sarana dan prasarana berbasis SIM geografi tata ruang dan pertanahan
Adanya pembinaan kepada masyarakat terkait masalah pertanahan dan tata ruang	Masih adanya sengketa masalah pertanahan
Kebutuhan penyelesaian pemetaan tata ruang	Banyak tanah SG yang dikuasai masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan
	Diperlukan adanya data, fakta dan analisa untuk penyusunan RDTR dan reuiu RTRW

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Perijinan pemanfaatan ruang dan tanah
2. Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan ruang kepada masyarakat
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang
5. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak DIY dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Agrarian dan Tata Ruang untuk pemetaan rencana tata ruang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Program Perencanaan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	4 dokumen	1.897.711.084	Program Perencanaan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	4 dokumen	585.862.500	
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	dokumen tata ruang / raperda RTRW dan KLHS	1 dokumen	93.543.000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	raperda RTRW	1 dokumen	100.000.000	
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	dokumen raperda RDTR	4 dokumen	182.873.000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	raperda RDTR	2 dokumen	100.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 desa	47.480.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Kab. Bantul	sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	Digabung kegiatan studi tentang tata ruang
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	4 dokumen	160.826.000	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Kab. Bantul	dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	-	-	
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	dokumen RTBL dan masterplan	7 dokumen	846.709.000	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Kab. Bantul	Laporan pengisian konten geoportal	1 laporan	49.000.000	
Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	dokumen studi tata ruang	1 dokumen	66.280.084	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan	1 dokumen	86.862.500	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Publikasi tata ruang			
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Imogiri,	RTBL kawasan Karangtengah	1 dokumen	500.000.000	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kretek	RTBL kawasan Perbukitan Parangtritis	1 dokumen	250.000.000	Dana Keistimewaan
	Sewon	RTBL kawasan sumbu imajiner Krapyak-Sewon	1 dokumen							
Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	80%	1.734.994.862	Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Persentase efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	80%	132.476.800	
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Konsolidasi tanah	200 bidang	853.686.000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Konsolidasi tanah	20 bidang	57.776.800	
		pengendalian dan monitoring	6 kecamatan							
		audit pemanfaatan tanah tahun 2018	2 dokumen							
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta	437.994.000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	22.150.000	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	pengawasan yang tertangani	8 kecamatan	443.314.862	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan ruang kawasan pesisir	1 dokumen rekomendasi	52.550.000	
Program Pelayanan	DPTR Bantul	Nilai AKIP	83 angka	1.539.974.995	Program Pelayanan	DPTR Bantul	Nilai AKIP	83 angka	774.783.700	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
administrasi perkantoran					administrasi perkantoran					
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPTR Bantul	ATK	20 jenis	480.743.371	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	DPTR Bantul	ATK	44 jenis	197.600.000	
		alat listrik dan elektronik	11 jenis				alat listrik dan elektronik	12 jenis		
		materai	1600 buah				Materai	360 buah		
		peralatan kebersihan	14 jenis				peralatan kebersihan	17 jenis		
		pengisian tabung gas	15 tabung				pengisian tabung gas	8 tabung		
		pembayaran telepon	12 bulan				pembayaran telepon, listrik, internet, surat kabar	12 bulan		
		pembayaran air	12 bulan							
		pembayaran listrik	12 bulan				Publikasi	10 unit		
		pembayaran surat kabar	12 bulan							
		pembayaran internet	12 bulan							
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPTR Bantul	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	950 op	649.231.624	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	DPTR Bantul	Laporan hasil rapat	21 dokumen	188.154.500	
		koordinasi dan konsultasi keluar daerah	257 op				Jamuan tamu	100 orang		
		penyediaan makan minum rapat	1300 orang				Perjalanan dinas dalam daerah	178 op		
		penyediaan makan minum tamu	350 orang				Perjalanan dinas luar daerah	35 op		
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPTR Bantul	pembayaran honor tenaga non PNS	160 orang	410.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	DPTR Bantul	Jasa tenaga kontrak	168 ob	389.029.200	
Program peningkatan sarana dan	DPTR Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan	100%	1.079.973.778	Program peningkatan sarana dan	DPTR Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan	100%	122.400.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
prasarana aparatur		prasarana aparatur			prasarana aparatur		prasarana aparatur			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan gedung kantor	4 unit	299.367.731	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	20.000.000	
		pemeliharaan pagar kantor	1 unit							
		pemeliharaan halaman	1 unit							
		pemeliharaan tempat parkir	1 unit							
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPTR Bantul	suku cadang, jasa service dan pajak kendaraan	17 unit	184.436.631	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPTR Bantul	suku cadang kendaraan dan service	17 unit	80.000.000	
		BBM	10500 liter				BBM	4574		
		perpanjangan surat kendaraan dinas	17 unit				Pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit		
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	48.512.744	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPTR Bantul	pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPTR Bantul	filling kabinet	1 unit	547.620.672	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	DPTR Bantul	Pengadaan peralatan kantor	1 jenis	2.400.000	
		laptop	1 unit							
		printer	2 unit							
		printer A3	1 unit							
		monitor LED	2 unit							
		modem	1 unit							
		genset	1 unit							
		LCD proyektor	1 unit							
		kulkas	1 unit							
		komputer (peta)	2 unit							
		komputer	2 unit							
		IPAD	1 unit							
		drone	1 unit							
		software	1 unit							
meja rapat	25 unit									
kursi rapat	50 unit									

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPTR Bantul	Nilai evaluasi kinerja	88 angka	141.103.986	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	DPTR Bantul	Nilai evaluasi kinerja	88 angka	51.720.000	
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	DPTR Bantul	dokumen laporan keuangan	1 dokumen	95.750.159	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	DPTR Bantul	jasa pengelola keuangan	168 ob	51.720.000	
		dokumen laporan barang	1 laporan							
		jasa pengelola keuangan	156 ob							
		dokumen pelaksanaan jasa konsultansi	1 dokumen							
Pemutakhiran Data	DPTR Bantul	arsip data digital	8 dokumen	45.353.827	Pemutakhiran Data	-	-	-	-	
Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab. Bantul	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100%	1.166.290.172	Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab. Bantul	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100%	6.708.207.000	
Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	database terupdate	75 desa	28.636.183	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	Laporan inventarisasi tanah desa	1 dokumen	2.500.000	
		peserta sosialisasi	80 orang							
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	pendaftaran bidang / berkas dan pembayaran ke kantor pertanahan	50 bidang	101.117.780	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	7.560.000	
Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	permohonan surat dokumen kekancingan / rekomendasi Bupati	25 rekomendasi	56.536.209	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Rekomendasi pemanfaatan SG	5 dokumen	52.815.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	tanah desa terdaftar di Kabupaten Bantul	500 bidang	800.000.000	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	Pendaftaran tanah desa di BPN	1000 bidang	6.528.082.000	Dana Keistimewaan
							Peta bidang tanah desa	500 bidang		
							Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500 bidang		
							Pembuatan dan pemasangan patok bidang tanah desa	10 desa		
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	30 rekomendasi	180.000.000	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	20 dokumen rekomendasi	117.250.000	Dana keistimewaan
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	286.448.435	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	250.000.000	
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	20 kasus	36.448.435	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pajangan, Banguntapan, Piyungan	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	3 kasus	50.000.000	
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200.000.000	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200.000.000	Dana keistimewaan
				7.846.461.312					8.625.450.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				
a	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Guwosari, Pajangan	permasalahan pertanahan yang ditangani / difasilitasi	1 kegiatan	Usulan PIK

Dari hasil rekapitulasi usulan kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan terdapat satu usulan kegiatan dari urusan pertanahan dari Desa Guwosari Kecamatan Pajangan yang masuk DPTR yaitu sosialisasi serta fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan 1 kegiatan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	Sesudah Ada Pandemi Covid-19
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan <i>smart services</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	8,5 (baik)	8,5 (baik)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen
	Terpenuhiya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
		Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
		Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen
	Terpenuhiya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhiya saran prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4 dokumen	4 dokumen
			Persentase cakupan pengendalian tata ruang	80 %	80 %
			Cakupan sertifikasi tanah	100%	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Sebagaimana tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan adanya pandemi Covid-19, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga mengalami penyesuaian.

Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
020401	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				8.625.450.000,00
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				718.339.300,00
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				718.339.300,00
0103.32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				585.862.500,00
0103.020 401.32.00 1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan Raperda RTRW	4 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000,00
0103.020 401.32.00 2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		Raperda RDTR perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 dokumen	100.000.000,00
0103.020 401.32.00 7	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan		Laporan pengisian konten geoportal	1 dokumen	49.000.000,00
0103.020 401.32.03 8	Studi tentang Tata Ruang		Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan) publikasi tata ruang	1 dokumen 2 jenis	86.862.500,00
0103.020 401.32.04 0	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten		RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	1 dokumen	250.000.000,00
0103.34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG				132.476.800,00
0103.020 401.34.00 1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		konsolidasi tanah	80 persen 30 bidang	57.776.800,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
0103.020 401.34.01 0	Pengembangan data pemanfaatan ruang		publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	22.150.000,00
0103.020 401.34.01 1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	1 dokumen rekomendasi	52.550.000,00
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7.907.110.700,00
0204	PERTANAHAN				7.907.110.700,00
0204.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	774.783.700,00
0204.020 401.01.03 6	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Alat tulis kantor	41 jenis	197.600.000,00
			Alat listrik dan elektronika	12 jenis	
			Materai	360 lembar	
			Peralatan dan bahan kebersihan	17 jenis	
			Pengisian tabung gas	8 tabung	
			Pembayaran telepon, listrik, internet dan surat kabar	12 bulan	
			Publikasi	10 unit	
0204.020 401.01.03 7	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	21 dokumen	188.154.500,00
			Jamuan tamu	100 orang	
			perjalanan dinas dalam daerah	178 op	
			perjalanan dinas luar daerah	35 op	
0204.020 401.01.03 8	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		jasa tenaga kontrak	168 ob	389.029.200,00
0204.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	122.400.000,00
0204.020 401.02.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	20.000.000,00
0204.020 401.02.02 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		suku cadang kendaraan dan servis	17 unit	80.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
			bahan bakar minyak	4574 liter	
			pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	
0204.020 401.02.03 0	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	20.000.000,00
0204.020 401.02.05 1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan kantor	1 jenis	2.400.000,00
0204.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	51.720.000,00
0204.020 401.06.00 8	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	168 ob	51.720.000,00
0204.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100 angka	6.708.207.000,00
0204.020 401.16.00 9	Inventarisasi tanah kas desa		Laporan inventarisasi tanah desa	1 dokumen	2.500.000,00
0204.020 401.16.01 4	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY		Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	7.560.000,00
0204.020 401.16.01 7	Pemanfaatan Tanah SG		rekomendasi pemanfaatan SG	5 dokumen	52.815.000,00
0204.020 401.16.01 8	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten		pendaftaran tanah desa di BPN	1000 bidang	6.528.082.000,00
			peta bidang tanah desa	500 bidang	
			Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500 bidang	
			1. Pembuatan patok bidang tanah desa 2. Pemasangan patok bidang tanah desa	10 desa	
0204.020 401.16.01 9	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten		rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah	20 dokumen	117.250.000,00

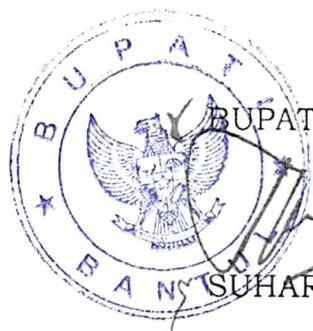
Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikator
			Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6
			kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul		
0204.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	250.000.000,00
0204.020 401.17.00 1	penyelesaian konflik-konflik pertanahan		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3 kasus	50.000.000,00
0204.020 401.17.00 2	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa		fasilitasi rekomendasi Bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 desa	200.000.000,00

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.


BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

**DINAS PERTANAHAN DAN
TATA RUANG**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN			PAGU	
			No	Indikator Keluaran	Target		Satuan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang						8.625.450.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					660.562.500,00	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					299.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					299.000.000,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	1	RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	1	dokumen	250.000.000,00
		Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	1	Laporan pengisian konten geoportal	1	dokumen	49.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					361.562.500,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota					200.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	1	Raperda RTRW	1	Dokumen	100.000.000,00
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	1	Raperda RDTR perkotaan dan RDTR Perdesaan	2	dokumen	100.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					86.862.500,00	
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Studi tentang Tata Ruang	1	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	1	dokumen	86.862.500,00
			2	publikasi tata ruang	2	jenis	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					22.150.000,00	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pengembangan data pemanfaatan ruang	1	publikasi data pemanfaatan ruang	2	jenis	22.150.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					52.550.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1	fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	1	dokumen rekomendasi	52.550.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					7.015.983.800,00	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					250.000.000,00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.					250.000.000,00	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	1	fasilitasi rekomendasi Bupati/kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5	desa	200.000.000,00
		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3	kasus	50.000.000,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					6.765.983.800,00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					6.765.983.800,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	1	Dokumen pendaftaran tanah	1	dokumen	7.560.000,00
		Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	1	pendaftaran tanah desa di BPN	1000	bidang	6.528.082.000,00
			2	peta bidang tanah desa	500	bidang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
			3	Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	500	bidang	
			4	1. Pembuatan patok bidang tanah desa 2. Pemasangan patok bidang tanah desa	10	desa	
		Inventarisasi tanah kas desa	1	Laporan inventarisasi tanah desa	1	dokumen	2.500.000,00
		Pemanfaatan Tanah SG	1	rekomendasi pemanfaatan SG	5	dokumen	52.815.000,00
		Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	1	rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa di Kabupaten Bantul	20	dokumen	117.250.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1	konsolidasi tanah	30	bidang	57.776.800,00
	URUSAN UMUM						948.903.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						948.903.700,00
	Administrasi Keuangan						51.720.000,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	1	jasa pengelola kepegawaian	12	ob	2.400.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	1	jasa pengelola keuangan dan barang	156	ob	49.320.000,00
	Administrasi Umum						897.183.700,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Materai	360	lembar	1.620.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran telepon, listrik, internet	12	bulan	87.900.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Publikasi	10	unit	5.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	service, KIR dan pajak kendaraan dinas	17	unit	17.760.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1	jasa tenaga kontrak	168	ob	389.029.200,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	service pemeliharaan peralatan kantor	5	jenis	10.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat tulis kantor	41	jenis	68.899.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	barang cetakan	100	bendel	17.500.000,00
			2	penggandaan	40000	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Alat listrik dan elektronika	12	jenis	5.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Peralatan dan bahan kebersihan	17	jenis	9.881.000,00
			2	Pengisian tabung gas	8	tabung	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran surat kabar	12	bulan	1.800.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan hasil rapat	21	dokumen	22.100.000,00
			2	Jamuan tamu	100	orang	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	perjalanan dinas dalam daerah	178	op	166.054.500,00
			2	perjalanan dinas luar daerah	35	op	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pengadaan peralatan kantor	1	jenis	2.400.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2	unit	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	suku cadang kendaraan dinas	17	unit	62.240.000,00
			2	bahan bakar minyak	4574	liter	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	suku cadang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	jenis	10.000.000,00